



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print)ISSN: 2477-8524(Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Analysis cost benefit program keluarga berencana provinsi Sulawesi Tengah

Syamsuddin HM<sup>\*)</sup>, Calvin A Parinding, Laendatu Paembonan, Yoberth Kornelius  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 06<sup>th</sup>, 2022

Revised Apr 02<sup>nd</sup>, 2022

Accepted Jun 22<sup>nd</sup>, 2022

#### Keyword:

Cost benefit  
Program Keluarga Berencana

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, manfaat anggaran program KB terhadap pembangunan kependudukan, dan untuk mengetahui besaran nilai ekonomi dari anggaran program KB di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode analisis Untuk melihat laju pertumbuhan penduduk, penelitian menggunakan metode geometrik, Untuk menghitung manfaat dan biaya menggunakan metode Net Present Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2017-2019 telah memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi di Sulawesi Tengah. Besarnya keuntungan secara ekonomi atas pelaksanaan program keluarga berencana selama kurun waktu Tahun 2017 – 2019 sebesar Rp. 54.671.974.876. Besarnya Biaya pemerintah untuk pengeluaran pendidikan yang tercegah selama kurun waktu 2017 – 2019 karena adanya penekanan jumlah penduduk usia 0-4 tahun sebesar Rp.17.701.530.000.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Syamsuddin HM,  
Universitas Tadulako  
Email: [Syamsuddin120660@gmail.com](mailto:Syamsuddin120660@gmail.com)

## Pendahuluan

Data hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 2.635.010 jiwa. Sepuluh tahun kemudian yaitu data hasil proyeksi penduduk tahun 2020 jumlah penduduk di daerah ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 3.096.976 jiwa. Secara absolut jumlah penduduk selalu bertambah sebagai akibat adanya perbedaan antara fertilitas dan mortalitas serta adanya migrasi masuk. Walaupun secara absolut jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, akan tetapi jika pengamatan terhadap laju pertumbuhan relatif justru penduduk di daerah ini mengalami penurunan yang cukup berarti. Pada periode tahun 1990 – 2000 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah menurun menjadi sebesar 1,97 %. Kemudian periode tahun 2010-2020 pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan lagi menjadi 1,22 %. (BPS, 2021). Penurunan ini tidak terlepas dari genjarnya kegiatan program KB khusus yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Statisik, 2010). Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan baik pemerintah daerah maupun para anggota dewan, BKKBN dalam hal ini staf dan pimpinannya secara intensif melakukan sosialisasikan program KB baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini pula merupakan salah satu indikasi keberhasilan program keluarga berencana dalam menekan tingkat fertilitas. Hal ini terlihat dari menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada beberapa periode sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah beberapa waktu yang

lalu.TFR Provinsi Sulawesi Tengah memperlihatkan kecenderungan yang terus menurun. Data tahun 2007 TFR di daerah ini sebesar 3,3 per wanita, turun menjadi 3,2 per wanita pada periode 2012 dan pada tahun 2017 TFR menjadi sebesar 2,7 (SDKI, 2017).

Kemudian dari sisi persentase kepersertaan pemakaian kontrasepsi KB juga menunjukkan adanya kecenderungan fluktuatif. Data tahun 2018 persentase penduduk usia subur yang memakai kontrasepsi sebesar 63,6 %, Kemudian pada tahun 2019 persentase penduduk usia subur yang memakai kontrasepsi mengalami penurunan menjadi 53,17 %. Kemudian pada tahun 2020 persentase pemakaian alat kontrasepsi mengalami kenaikan menjadi 65,26 %.

Faktor lain yang ikut berpengaruh sebagai akibat program KB yang dilakukan selama ini adalah terkait median usia kawin pertama. Data tentang usiakawin pertama di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami naik turun selama periode 2018-2020. Data 2018 median usia kawin pertama wanita usia subur 19,9 tahun. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 18,9 tahun, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 20,9 tahun. ( Data IKU BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, 2021)

Jika laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak segera diantisipasi dengan program keluarga berencana, maka akan memberikan implikasi yang buruk bagi pembangunan ekonomi di daerah ini. Busung lapar dan berbagai macam gejala sosial yang terjadi selama ini tidak terlepas dari adanya ketidak seimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja baru. Sehingga jumlah penduduk miskin akan lebih bertambah lagi. Mengacu pada beragam permasalahan tersebut, maka kajian mengenai berapa besar manfaat program KB terhadap pembangunan di daerah ini melalui pengukuran cost benefit analysis sangat penting untuk dilaksanakan (Ansanoor, 2021).

Untuk melaksanakan program KB ini, pemerintah mengeluarkan anggaran yang relatif besar. Data tahun 2017 jumlah alokasi anggaran untuk program KB sebesar Rp. 7.507.877.000. Tahun 2018 menurun menjadi Rp. 6.984.825.000,- dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 7.488.569.000,.

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, Maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah apakah dengan adanya penekanan laju pertumbuhan penduduk dan dengan menggunakan biaya program KB yang relatif besar tersebut dapat memberikan manfaat pada daerah baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosialnya. Memperhatikan program KB yang dilaksanakan selama ini serta memperhatikan dukungan alokasi anggaran program KB relative besar setiap tahunnya. Maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah anggaran program KB yang dilaksanakan selama ini bermanfaat bagi pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah serta Seberapa besar nilai manfaat program KB jika diukur secara ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat pelaksanaan program KB terhadap pembangunan kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah serta mengetahui besaran nilai ekonomi dari anggaran program KB.

Analisis biaya manfaat (CBA) merupakan suatu alat yang paling penting untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan. Analisis biaya manfaat adalah mengukur besarnya manfaat dari program KB. Sementara biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program KB. Manfaat merupakan kerugian atau biaya yang dapat dicegah di masa mendatang (Yushanata, 2021). Pada dasarnya analisis biaya manfaat menawarkan perbandingan antara seluruh biaya dan manfaat dari suatu program yang dibiayai dari dana masyarakat.

Prinsip Cost and Benefit Analysis adalah (1) Tujuan sosial menyangkut efisiensi ekonomi untuk mencapai keuntungan yang maksimal, termasuk kesejahteraan sosial dan dengan biaya yang minimal. (2) meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkaian tindakan tersebut dalam suatu periode tertentu membutuhkan ukuran khusus yang biasanya adalah uang.

Menurut Prijono dan Soesetyo, (1994) Karena dampak dari suatu program baru dapat terlihat setelah beberapa lama, maka nilai-nilai biaya dan manfaat program tersebut harus disesuaikan mengingat nilainya berubah menurut perjalanan waktu. Dalam hal ini digunakan discounting. Discounting adalah cara penyesuaian nilai atau uang dengan menghitung berapa nilai uang saat ini dikemudian hari dengan memperhitungkan bunga pada akhir setiap tahun.

## Metode

Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini mencoba menelaah data-data sekunder yang sudah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi dan Dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data yang digunakan adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, serta sumber lain yang ada kaitannya

dengan tujuan penelitian ini. Analisis lebih terfokus pada data sekunder berupa data sensus penduduk 2010, data proyeksi penduduk tahun 2010-2035. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain dan selanjutnya dielaborasi sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Sementara data primer berupa informasi-informasi yang dapat mendukung data sekunder. Untuk melihat laju pertumbuhan penduduk, penelitian menggunakan metode geometrik dengan formulasi sebagai berikut :

$$P_t = P_o (1 + r)^2$$

$P_t$  = merupakan jumlah penduduk pada tahun tertentu

$P_o$  = merupakan jumlah penduduk pada tahun dasar

$r$  = merupakan rata-rata laju pertumbuhan penduduk

Untuk menghitung manfaat dan biaya menggunakan dua metode, yaitu analisis benefit cost ratio dan Net Present Value, dengan formulasi sebagai berikut :

$$NPV = -C + \frac{R_1}{(1+r)^1} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \frac{R_3}{(1+r)^3}$$

Dimana :

NPV = Net present value

R = Benefit atau keuntungan

r = Tingkat bunga yang digunakan 10%.

C = Besarnya modal atau anggaran

Jika Net Present Value (NPV) lebih besar dari nol, maka program tersebut akan menghasilkan keuntungan ekonomis. Asumsi-Asumsi untuk pengeluaran kesehatan menggunakan ketentuan bank dunia \$US 12 perkapita pertahun. Jika diasumsikan 1 dolar Rp. 14.000. maka nilai konversi 12 dolar menjadi Rp. 168.000,-. Untuk pengeluaran pendidikan mengacu pada hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2016. Hasil susenas menunjukkan bahwa pengeluaran per rumahtangga untuk pendidikan perbulan adalah sebesar Rp. 32.278. Jika diasumsikan bahwa rata-rata per rumahtangga memiliki anak sebanyak 3 orang, maka besarnya biaya pendidikan anak perkapita per bulan sebesar Rp. 96.834. Untuk biaya persalinan mengacu pada standar pembiayaan BPJS kesehatan tahun 2014 dengan persalinan normal sebesar Rp. 600.000,- dan Rp. 750.000,- untuk persalinan dengan tindakan emergensi dasar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah penduduk usia 0 – 4 dan 5-9 tahun. Alasan pengambilan kelompok umur ini karena pada usia ini efek program keluarga berencana (KB) mudah diukur dengan melihat jumlah anak yang lahirkan. Sedangkan pada usia 5-9 tahun dimana pada usia ini mereka sudah masuk pada jenjang pendidikan dasar.

## Results and Discussions

### Laju pertumbuhan

Pertambahan penduduk suatu daerah ditentukan oleh tiga komponen variabel demografi. Ketiga komponen tersebut adalah fertilitas, mortalitas dan migrasi. Suatu daerah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi selanjutnya angka kematian rendah, maka kontribusi angka kelahiran terhadap laju pertumbuhan penduduk suatu daerah akan lebih dasar karena pertumbuhan alamiah. Sebaliknya apabila laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sementara total fertility rate rendah dan mortalitas rendah, maka migrasi memberikan kontribusi terbesar dalam memacu laju pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan kecenderungan naik turun. Tahun 1971 laju pertumbuhan penduduknya hanya sebesar 2,83 %. Sepuluh tahun kemudian yaitu data hasil sensus penduduk tahun 1980, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan menjadi 3,86 %. Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun ini banyak dipengaruhi adanya migrasi masuk, baik migrasi spontan maupun migrasi karena adanya program pemerintah melalui transmigrasi dari daerah Jawa dan Bali ke Sulawesi Tengah. Kemudian data tahun 1990 laju pertumbuhan penduduk di daerah ini mengalami penurunan yang relatif berarti dari 3,86 % pada tahun 1980 menjadi 2,87 % pada tahun 1990. Penurunan ini tidak terlepas dari adanya program keluarga berencana yang sudah masuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya di bawah ini akan disajikan data perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tengah sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 1.** Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 1971- 2020.

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
1971)	913.662	2,83 (1961-1971)
1980)	1.289.635	3,86 (1971-1980)
1990)	1.711.327	2,87 (1980-1990)
2000)	2.175.993	2,52 (1990-2000)
2010)	2.635.010	1,95 (2000-2010)
2020)	3.096.976	1,63

Sumber : BPS, Sensus penduduk1) dan Data Proyeksi2) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020

### Implikasi Program KB Terhadap Komposisi Umur Penduduk

Adanya program keluarga berencana dapat mempengaruhi perubahan komposisi penduduk, khususnya pada usia 0-4 tahun maupun pada usia 5-9 tahun. Perubahan tersebut nampak pada perubahan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia 0 – 4 tahun sebesar 299.500 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 0 – 4 tahun menurun menjadi 296.501 jiwa. Secara absolut tampak adanya penambahan penduduk, akan tetapi secara relatif penduduk usia 0-4 tahun maupun penduduk usia 5-9 tahun mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan implikasi dari perubahan sikap dan perilaku pasangan usia subur terhadap pandangan mereka mengenai anak. Disamping itu, adanya perubahan relatif, juga dipengaruhi oleh adanya partisipasi wanita usia subur pada program KB.

**Tabel 2.** Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017-2019

Tahun/Umur	0-4	5-9	Total Penduduk
2017	299.500	284.400	683.900
2018	299.400	290.600	590.000
2019	299.100	296.500	595.600

Sumber data : BPS. Proyeksi Penduduk 2010-2035

Adanya perubahan komposisi penduduk pada usia 0 – 4 tahun tersebut, memberikan indikasi, bahwa betapa besarnya kontribusi program KB dalam upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk, maupun kontribusinya pada penambahan penduduk secara absolut. Hasil perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 – 4 tahun tanpa dengan program KB dengan adanya program KB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.** Perbandingan jumlah penduduk Usia 0 – 4 Tahun tanpa Program KB dengan Program KB.

Penduduk Usia 0-4 Tahun Tanpa Program KB		Penduduk Usia 0-4 Tahun dengan Program KB		Selisih
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah	
2017	311.061	2017	299.500	11.561
2018	310.957	2018	299.400	11.557
2019	310.645	2019	299.100	11.545.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan Data Proyeksi

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa betapa besarnya penyimpangan jumlah penduduk antara penduduk tanpa program KB dengan jumlah penduduk dengan adanya program KB. Tahun 2017 jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang dapat ditekan karena adanya program KB sebesar 11.561 jiwa. Sementara pada tahun 2018 jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang dapat ditekan sebesar 11.557 jiwa. Kemudian tahun 2019 besarnya penduduk 0-4 tahun yang dapat ditekan sebesar 11.545 jiwa.

### Analisis Biaya Manfaat Program KB

#### Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah dari Aspek Pendidikan

Pemerintah memiliki kewajiban dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi terhadap kewajiban tersebut, maka pemerintah setiap tahun mengeluarkan anggaran yang cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi masyarakatnya.

Adanya komitmen pemerintah yang besar terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia tersebut, maka pemerintah dengan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati besarnya alokasi dana pendidikan terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 %. Angka ini sangat signifikan, sehingga diharapkan dengan adanya alokasi dana yang begitu besar tersebut, mutu sumberdaya manusia meningkat serta partisipasi masyarakat terhadap pendidikan meningkat pula.

Jika laju pertumbuhan penduduk tidak dapat ditekan, maka penambahan jumlah penduduk akan mempersulit bagi pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu hidup sejahtera dan mampu mengikuti pendidikan dengan biaya murah. Pertambahan penduduk tanpa dikuti dengan mutu yang berkualitas dan tanpa daya dukung ekonomi yang memadai, maka penambahan penduduk menjadi beban bagi pembangunan.

Adanya penekanan jumlah penduduk, maka beban pemerintah dapat diatasi dan pemerataan pembangunan dapat diraih. Penekanan jumlah penduduk juga dapat mengurangi beban pengeluaran pemerintah maupun masyarakat khususnya aspek pendidikan. Bagi pemerintah adanya penekanan penduduk, maka jumlah alokasi anggaran pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Khusus di Provinsi Sulawesi, jumlah penduduk usia balita yang dapat ditekan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 relatif signifikan. Akibat penekanan penduduk umur 5-9 tahun selama 2017-2019 maka jumlah alokasi dana pendidikan yang dapat dicegah oleh pemerintah besar Rp. 66.147.280.000

#### **Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Aspek Kesehatan**

Penekanan jumlah pertumbuhan penduduk akan memberikan pengaruh pada penekanan pengeluaran pemerintah pada aspek kesehatan baik pada rumah tangga masyarakat maupun pada rumah tangga pemerintah. Bagi pemerintah penurunan jumlah penduduk akan memberikan dampak pada penekanan alokasi dana untuk pembiayaan kesehatan khususnya pada pembiayaan pelayanan kesehatan reproduksi dan biaya pelayanan kesehatan dasar. Berikut ini akan disajikan besarnya biaya kesehatan yang bisa dicegah atau yang dapat ditekan oleh pemerintah akibat adanya penekanan jumlah penduduk.

**Tabel 4.** Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah dari Aspek Kesehatan

Tahun	Penduduk Usia 0-4 yang Tercegah	Biaya Kesehatan Perkapita	Biaya Kesehatan Reproduksi	Total Biaya yang tercegah
2017	11.561	1.942.248.000	6.936.600.000	8.878.848.000
2018	11.557	1.941.576.000	6.927.560.000	8.869.136.000
2019	11.545	1.939.560.000	6.927.800.000	8.866.560.000

Sumber : Data hasil penelitian, Tahun 2019.

Data tersebut di atas memperlihatkan dengan adanya program keluarga berencana telah memberikan pengaruh pada penekanan jumlah penduduk umur 0-4 tahun. Tahun 2017, besarnya jumlah penduduk umur 0-4 yang dapat dicegah sebesar 11.561 jiwa. Adanya pencegahan kelahiran tersebut memberikan manfaat pada tercegahnya pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi sebesar Rp. 8.878.848.000. Demikian pula pada tahun 2019, dengan adanya penekanan jumlah kelahiran penduduk umur 0-4 tahun sebesar 11.545 jiwa memberikan pengaruh pada pencegahan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi sebesar Rp. 8.866.650.000. Sementara alokasi dana kesehatan yang dapat cegah sebagai akibat tercegahnya kelahiran, maka alokasi dana yang dapat dicegah untuk pelayanan kesehatan dan persalinan bagi penduduk umur 0-4 tahun selama 2017-2019 sebesar Rp. 26.621.184.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KB sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil perhitungan nilai present valuenya (NPV) sebesar  $81.851.224 > 0$ .

$$NPV = -21.981.271.000 + \frac{8878848000}{1,1} + \frac{8869136000}{1,21} + \frac{886656000}{1,331}$$

$$NPV = -2198127100 + 8071680000 + 7329864463 + 6661577761$$

$$NPV = 22063122224 - 21981271000 = 81851224 > 0.$$

Nilai NPV lebih besar dari nol memberikan makna bahwa investasi dalam penekanan terhadap jumlah penduduk akan memberikan keuntungan ekonomi yang cukup signifikan bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan kata lain alokasi anggaran dalam program KB yang telah dijalankan oleh pemerintah selama ini sangat bermanfaat bagi pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah.

Pengamatan terhadap penduduk usia 5-9 tahun menunjukkan program KB yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional juga memperlihatkan kontribusi

keuntungan dalam menekan alokasi anggaran bagi pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang cukup berarti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dengan menekan jumlah penduduk usia 5-9 untuk bidang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, dan pendidikan sebesar Rp.54.671.974.876. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (Countdown Europe, 2015), yang menyatakan bahwa dengan membiayai alat kontrasepsi sebesar US\$ 3,6 milyar pertahun, memberikan dampak pada penurunan biaya pelayanan kesehatan bayi yang baru lahir dan ibunya sebesar US\$ 5,1 milyar pertahun, serta biaya untuk penyediaan perawatan pasca aborsi menurun sebesar US\$ 4,140 juta pertahun. Setiap US\$ 1 yang dihabiskan untuk program KB akan menghemat setidaknya US\$ 4 yang seharusnya dapat dihabiskan mengobati komplikasi dari kehamilan yang tidak diinginkan. Melihat besarnya biaya yang dapat dicegah pemerintah tersebut, maka langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah ke depan adalah mengupayakan agar program keluarga berencana semakin intensif dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

#### Analisis Pengeluaran Masyarakat yang dapat Dicegah

Adanya penekanan jumlah penduduk sebagai akibatnya program KB, akan memberikan pengaruh pada variasi pengeluaran masyarakat. Pengeluaran yang dihitung adalah pengeluaran untuk biaya kesehatan reproduksi dan pengeluaran untuk biaya pendidikan.

**Tabel 5.** Analisis Pengeluaran Masyarakat yang Dapat dicegah karena Adanya Program KB di Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun	Jml Penduduk 0-9 yang tercegah	Biaya Pendidikan yang tercegah(Rp)	Biaya Kesehatan dan persalinan yang tercegah (Rp)	Total biaya yang tercegah (Rp)
2017	22.539	721.248.000	17.309.952.000.	18.031.200.000
2018	22.774	728.768.000	17.490.432.000	18.219.200.000
2019	22.990	735.680.000	17.526.720.000	18.262.400.000
	Jumlah	2.185.696.000	52.327.104.000	54.512.800.000

Sumber; BPS, Data proyeksi 2010-2035.

Dengan mengacu pada asumsi-asumsi tersebut dalam metode penelitian di atas, maka besarnya dana masyarakat yang dapat dicegah sebagai akibat penekanan jumlah penduduk untuk pengeluaran pendidikan atau dengan kata lain jumlah uang yang bisa ditabung oleh masyarakat pada tahun 2017-2019 sebesar Rp. 2.185.696.000. Sementara pengeluaran untuk biaya kesehatan yang dapat tercegah selama tahun 2017-2019 karena adanya penekanan jumlah penduduk 0-9 tahun sebesar Rp. 52.327.104.000,-Secara total besarnya pengeluaran masyarakat yang dapat dicegah untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan adalah sebesar Rp. 54.512.800.000. (Tabel 5.) Sementara dana pemerintah yang dapat dicegah karena adanya pencegahan jumlah penduduk usia 5-9 tahun, dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6.** Analisis Pengeluaran Pemerintah yang Dapat dicegah karena Adanya Program KB di Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun	Jml Penduduk 5-9 yang tercegah	Dana BOS Pendidikan yang tercegah (Rp)	Biaya Kesehatan dan persalinan yang tercegah (Rp)	Total biaya yang tercegah (Rp)
2017	22.539	20.858.200.000,-	1.844.304.000,-	22.702.504.000
2018	22.774	21.312.300.000,-	1.844.456.000,-	23.156.756.000
2019	22.990	21.745.500.000,-	1.922.760.000,-	23.668.260.000
	Jumlah	63.916.000.000,-	5.611.520.000,-	69.527.520.000.

Sumber.BPS.Proyeksi penduduk Sulawesi Tengah, 2010-2035.

Pada tabel di atas tampak bahwa dana pemerintah yang dapat dicegah untuk bidang pendidikan selama interval waktu tahun 2017-2019 adalah sebesar Rp. 63.916.000.000,- sementara untuk dana kesehatan yang dapat tercegah sebagai akibat adanya penekanan jumlah penduduk usia 5-9 tahun adalah sebesar Rp. 5.611.520.000,-sehingga total dana yang dapat dihemat oleh pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan selama interval waktu tahun 2017 sampai 2019 sebesar 69.527.520.000,-

#### Analisis Benefit Cost Ratio dan Net Present Value

Hasil perhitungan benefit cost ratio program KB di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar 2,48. angka ini memberikan makna bahwa program keluarga berencana yang dilaksanakan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah memberikan manfaat yang cukup berarti bagi pembangunan di daerah ini.

Hal yang sama dengan menggunakan pendekatan net present value (NPV) juga memperlihatkan hasil yang sangat signifikan secara ekonomi yakni sebesar Rp. 54.671.974.876. yang memberikan makna bahwa investasi dalam penekanan jumlah penduduk akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat signifikan bagi pembangunan di daerah Sulawesi Tengah. Dengan kata lain program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan mafaat bagi pembangunan di daerah ini.

## Simpulan

Dari beberapa hasil uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : a) Program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2017-2019 telah memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi di Sulawesi Tengah; b) Besarnya keuntungan secara ekonomi atas pelaksanaan program keluarga berencana selama kurun waktu Tahun 2017 – 2019 sebesar Rp. 54.671.974.876; c) Besarnya Biaya pemerintah untuk pengeluaran pendidikan yang tercegah selama kurun waktu 2017 – 2019 karena adanya penekanan jumlah penduduk usia 0-4 tahun sebesar Rp.17.701.530.000. Sementara dana pelayanan kesehatan yang dapat dicegah sebesar Rp.20.169.016.000,; d) Besarnya biaya pengeluaran masyarakat yang dapat dicegah untuk pendidikan selama periode penelitian sebesar Rp. 6.481.978.440,- sedangkan untuk biaya kesehatan mencapai Rp. 7.978.562.340,-; e) Besarnya Benefit/Cost = 2,48 > 1. Yang berarti bahwa program BKKBN dapat menguntungkan.

## Referensi

- Afrinaldi, Y. S. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kabupaten Muaro Jambi. *Perspektif*, 187-194.
- Ananditha, B. &. (2021). Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dppkbp3a) Dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana Di Bangkinang. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 170-185.
- Ansanoor, S. P. (2021). Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 31-46.
- Countdown. (2015). *Family Palaning, Poverty and Economic development*. IPPF Europe.
- Fitri, F. R. (2022). *Etika Birokrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 95-109.
- Gani, A. (2008). *Cost Benefit Analysis Pertumbuhan Penduduk OKI*. FKM. Jakarta: FKM, Universitas Indonesia.
- Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan*. Doctoral Dissertation.
- Laili, N. (2021). *Laporan Kuliah Kerja Magang (Kkm) Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Komitmen Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang*. Doctorak Dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Lubis, D. (2022). *Kajian Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Pemogan Dengan Menggunakan Model Pelibatan Masyarakat WHO*. *Jurnal Promkes*. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*.
- Nainggolan, L. P. (2021). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- Putra, E. H. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo*. *Bharanomics*, 51-60.
- RD, A. I. (2021). *Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan Perspektif Ibnu Sina Dan Relevansinya Dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 91-110.
- Riwu, E. A. (2022). *Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Desa Keliha Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-11.
- Statisik, B. P. (2010). *Proyeksi Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P. (2010). *Sensus Penduduk Tahun 2010* Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sudarmanto, E. S. (2021). *Komunikasi Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- Yushanata, P. &. (2021). *Analisis Pembiayaan Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Sehat Dengan Pendekatan Cost Benefit Analysis (CBA)*. *Jurnal Kesehatan*, 306-313.